

Pengadilan Agama Tulungagung

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024

Jl. Ir. Soekarno Hatta No 117 Tulungagung - 66261



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ir. Soekarno - Hatta No.117

Telp. 0355-336516 Fax. 0355-336121

Tulungagung - Jawa Timur 66261

e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Tulungagung adalah salah satu Entitas Akuntansi dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tulungagung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tulungagung, 18 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



HA Iw i e, S.H.
NIR 19670228 199303 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	19
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	21
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
VI. Lampiran dan Daftar	

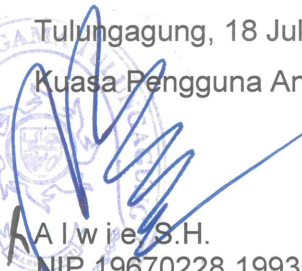
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117 Tulungagung – Jawa Timur 66261
Telp. 0355-336516 Fax.0355-336121 e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tulungagung, 18 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

A. Alwie S.H.
NIP 19670228 199303 1 003



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung per 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 141.028.500,- atau mencapai 42,23 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 333.953.000,-

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 92.930.500,- atau mencapai 58,45 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 159.250.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 233.180.066,- ; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 233.180.066; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0;. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 233.180.066,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 141.028.500,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 95.866.320,- sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 45.162.180,-. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0,- ;dan defisit sebesar Rp. 0,- ;sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp. 45.162.180,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 6.752.386,- ditambah Surplus-LO sebesar Rp. 45.162.180,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0; dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (37.698.000,-); Kenaikan/penurunan Ekuitas Rp. 7.464.180,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp. 14.216.566,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	333.953.000	141.028.500	42,23	161.756.000
JUMLAH PENDAPATAN		333.953.000	141.028.500	42,23	161.756.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	159.250.000	92.930.500	58,36	110.810.000
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		159.250.000	92.930.500	58,36	110.810.000
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	-	-	0,00	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		159.250.000	92.930.500	58,36	110.810.000

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	217.963.500	-
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	14.216.566	6.752.386
Jumlah Aset Lancar		233.180.066	6.752.386
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	-	-
Peralatan dan Mesin	C.14	-	-
Gedung dan Bangunan	C.15	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		233.180.066	6.752.386
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	1.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	217.963.500	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		218.963.500	-
JUMLAH KEWAJIBAN		218.963.500	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	14.216.566	6.752.386
JUMLAH EKUITAS		14.216.566	6.752.386
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		233.180.066	6.752.386

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	141.028.500	161.756.000
JUMLAH PENDAPATAN		141.028.500	161.756.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	4.435.820	5.187.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	38.640.000	40.440.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	52.790.500	69.620.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		95.866.320	115.247.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		45.162.180	46.509.000
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		45.162.180	46.509.000
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		45.162.180	46.509.000

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMATULUNGAGUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	6.752.386	7.650.000
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	45.162.180	46.509.000
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	(37.698.000)	(43.606.450)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E. 8	7.464.180	2.902.550
EKUITAS AKHIR		14.216.566	10.552.550

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tulungagung

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

VISI Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan MISI sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Hukum yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Mewujudkan Efektifitas dalam Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Mewujudkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.

Dalam melaksanakan visi dan misi diatas, wajib bagi aparaturnya Pengadilan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai utama pada Mahkamah Agung yaitu :

1. Kemandirian;
2. Integritas;
3. Kejujuran;
4. Akuntabilitas;
5. Responsibilitas;
6. Keterbukaan;
7. Ketidak-berpihakan;
8. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI dituangkan dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas di mana 7 (tujuh) modul keuangan negara (Penganggaran, Komitmen, Pembayaran, Bendahara, Persediaan, Aset Tetap, dan Pelaporan) telah terintegrasi menjadi satu. Selanjutnya, SAKTI juga dirancang berdasarkan proses bisnis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) terbaru untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Tulungagung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Tulungagung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Tulungagung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 0.
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 0.

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya

adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan MasaManfaatAsetTetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	4 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2018 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam

Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp.141.028.500,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 141.028.500,- atau mencapai 42,23 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 333.953.000,-. Pendapatan Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi Per 30 Juni 2024	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	333.953.000	141.028.500	42,23
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	333.953.000	141.028.500	42,23

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 12,81 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari biaya perkara turun berdasarkan PP No. 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung R.I.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per Juni 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI Per 30 Juni 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	141.028.500	161.756.000	(12,81)
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	141.028.500	161.756.000	(12,81)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja Negara
Rp.92.930.500,-

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 92.930.500,- atau 58,45 persen dari Anggaran belanja sebesar Rp. 159.250.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	Realisasi per 30 Juni 2024	% Real Angg
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	159.250.000	92.930.500	58,36
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	159.250.000	92.930.500	58,36

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 mengalami penurunan 16,14 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena aktivitas belanja barang berkurang pada semester I Tahun Anggaran 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja TA per Juni 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	92.930.500	110.810.000	(16,14)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	92.930.500	110.810.000	(16,14)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 1.000.000,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024

Keterangan	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.000.000	-
	-	-
Jumlah	1.000.000	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp. 217.963.500,-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas lainnya dan setara kas pada bendahara penerimaan yaitu dana yang dikelola oleh satuan kerja dan dibukukan pada Rekening Perkara Lainnya (RPL). Dana yang disimpan dalam Rekening Perkara Lainnya (RPL) yang digunakan oleh bendahara penerimaan untuk menampung penerimaan negara sebelum disalurkan ke kas umum negara. Saldo Kas lainnya dan setara kas per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 217.963.500,- dan Rp. 0,-

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024

Keterangan	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023
Kas Lainnya dan Setara Kas	217.963.500	-
	-	-
Jumlah	217.963.500	-

Uang Muka dari KPPN
Rp. 1.000.000,-

C.3 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Keterangan	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023
Uang Muka dari KPPN	1.000.000	-
	-	-
Jumlah	1.000.000	-

Persediaan
Rp.14.216.566,-

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.14.216.566,- dan Rp. 6.752.386,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024

Persediaan	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023
Barang Konsumsi	14.216.566	6.752.386
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	14.216.566	6.752.386

Semua jenis persediaan tersebut pada saat tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan

PNBP

Rp.141.028.500,-

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 141.028.500,- dan Rp. 161.756.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	141.028.500	161.756.000	(12,81)
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	141.028.500	161.756.000	(12,81)

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan Pendapatan-LO dari pendapatan Hak-Hak Kepaniteraan yang diperoleh dari pelayanan perkara. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 12,81 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena penurunan realisasi pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari biaya perkara berdasarkan PP No. 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung R.I.

Beban Pegawai

Rp. 0,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban
Persediaan Rp.
4.435.820,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.435.820,- dan Rp. 5.187.000,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	4.435.820	5.187.000	(14,48)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	4.435.820	5.187.000	(14,48)

Beban Barang
dan Jasa Rp.
38.640.000,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 38.640.000,- dan Rp. 40.440.000,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dan beban barang operasional lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Bahan	240.000	240.000	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban Jasa Konsultan	35.000.000	35.000.000	-
Beban sewa	1.000.000	2.000.000	(50,00)
Beban Jasa Lainnya	2.400.000	3.200.000	(25,00)
Jumlah	38.640.000	40.440.000	(4,45)

Dibandingkan dengan TA 2022 Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 14,82 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan penurunan beban bahan, beban jasa konsultan, dan beban sewa pada realisasi 2024.

Beban
Pemeliharaan Rp.
0,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Perjalanan Dinas Rp. 52.790.500,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 52.790.500,- dan Rp. 69.620.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.790.500	69.620.000	(24,17)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah	52.790.500	69.620.000	(24,17)

Dibandingkan dengan TA 2023, Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 24,17 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya dikarenakan terdapat penurunan pelaksanaan aktivitas perjalanan dinas dilaksanakan pada semester I tahun 2024.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial Rp. 0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 0,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp. 0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Lain-lain
Rp. 0,-*

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus /Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional Rp.
0,-

D.12. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional lainnya	-	-	-
Pendapatan penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-
Penjualan Alat Kantor	-	-	-
Defisit Selisih Kurs	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-

Pos Luar Biasa
Rp. 0,-

D.13. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi per 30 Juni 2024	Realisasi per Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
6.752.386,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.752.386,- dan Rp. 7.650.000,-.

*Surplus LO
Rp. 45.162.180,-*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 45.162.180,- dan Rp. 45.509.000,-. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp. 0,-*

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

*Koreksi Aset Tetap
Rp. 0,-*

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

*Koreksi Atas Beban
Rp. 0,-*

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Atas Beban per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	-
Beban Jasa	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Pendapatan Rp. 0,-*

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Lainnya	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar
EntitasRp.
(37.698.000),-*

E.7 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. (37.698.000),- dan Rp.(43.606.450),-

*Kenaikan /
penurunan Ekuitas
Rp. 7.464.180,-*

E.8 Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Kenaikan / Penurunan Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.464.180,- dan Rp. 2.902.550,-

*Ekuitas Akhir Rp.
14.216.566,-*

E.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.216.566,- dan Rp. 10.552.550,-

DATA PENDUKUNG

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024
BAGIAN ANGGARAN 005.04

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 17/07/24 12:26 AM
Tgl Cetak : 17/07/24 3:37 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	141,028,500	161,756,000	(20,727,500)	(12.814)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	141,028,500	161,756,000	(20,727,500)	(12.814)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	141,028,500	161,756,000	(20,727,500)	(12.814)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	4,435,820	5,187,000	(751,180)	(14.482)
Beban Barang dan Jasa	38,640,000	40,440,000	(1,800,000)	(4.451)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	52,790,500	69,620,000	(16,829,500)	(24.173)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2024
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 17/07/24 12:26 AM

Tgl Cetak : 17/07/24 3:37 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

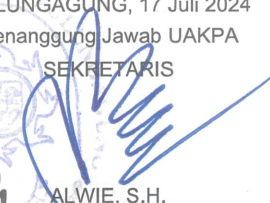
URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	95,866,320	115,247,000	(19,380,680)	(16.817)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	45,162,180	46,509,000	(1,346,820)	(2.896)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	45,162,180	46,509,000	(1,346,820)	(2.896)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	45,162,180	46,509,000	(1,346,820)	(2.896)

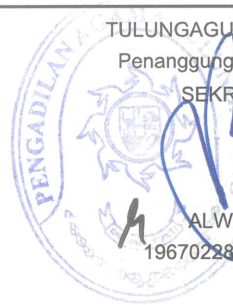
Keterangan :

null

null

null

TULUNGAGUNG, 17 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

ALWIE, S.H.
196702281993031003



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 17/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 17/07/24 3:38 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,752,386	7,650,000	(897,614)	(11.73)
SURPLUS/DEFISIT-LO	45,162,180	46,509,000	(1,346,820)	(2.9)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(37,698,000)	(43,606,450)	5,908,450	(13.55)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7,464,180	2,902,550	4,561,630	157.16
EKUITAS AKHIR	14,216,566	10,552,550	3,664,016	34.72

Keterangan :

null
null
null

TULUNGAGUNG, 17 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

ALWIE S.H.
196702281993031003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04

SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG 401382

Tgl Data : 17/07/24 12:26 AM

Tgl Cetak : 17/07/24 3:39 PM

Halaman : 1

lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	333,953,000	141,028,500	(192,924,500)	42	329,412,000	161,756,000	167,656,000	49
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	333,953,000	141,028,500	(192,924,500)	42	329,412,000	161,756,000	167,656,000	49
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	333,953,000	141,028,500	(192,924,500)	42	329,412,000	161,756,000	167,656,000	49
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	159,250,000	92,930,500	(66,319,500)	58	159,000,000	110,810,000	48,190,000	70
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	159,250,000	92,930,500	(66,319,500)	58	159,000,000	110,810,000	48,190,000	70
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG 401382

Tgl Data : 17/07/24 12:26 AM
Tgl Cetak : 17/07/24 3:39 PM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	159,250,000	92,930,500	(66,319,500)	58	159,000,000	110,810,000	48,190,000	70
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

null
null
null



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 17/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 17/07/24 3:40 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,000,000	0	1,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	217,963,500	0	217,963,500	0.00
Persediaan	14,216,566	6,752,386	7,464,180	110.54
JUMLAH ASET LANCAR	233,180,066	6,752,386	226,427,680	3,353.30
JUMLAH ASET	233,180,066	6,752,386	226,427,680	3,353.30
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	217,963,500	0	217,963,500	0.00
Uang Muka dari KPPN	1,000,000	0	1,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	218,963,500	0	218,963,500	
JUMLAH KEWAJIBAN	218,963,500	0	218,963,500	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	14,216,566	6,752,386	7,464,180	110.54
JUMLAH EKUITAS	14,216,566	6,752,386	7,464,180	110.54
JUMLAH EKUITAS	14,216,566	6,752,386	7,464,180	110.54
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	233,180,066	6,752,386	226,427,680	3,353.30

Keterangan :

null

null

null

TULUNGAGUNG, 17 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS
ALWIE, S.H.
196702281993031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 17/07/24 12:26 AM
Tgl Cetak : 17/07/24 3:41 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,000,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	217,963,500	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	14,216,566	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	217,963,500
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	92,930,500
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	141,028,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	10,400,000
0.0	391111	Ekuitas	0	6,752,386
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	43,095,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	97,933,500
3.0	521211	Beban Bahan	240,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	35,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,400,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	52,790,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,435,820	0
JUMLAH			470,074,886	470,074,886

Keterangan :

null
null
null

TULUNGAGUNG, 17 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS
ALWIE, S.H.
196702281993031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 17/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 17/07/24 3:41 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	92,930,500
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	141,028,500	0
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	43,095,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	97,933,500
3.0	521211	Belanja Bahan	240,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,500,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	35,000,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,400,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52,790,500	0
JUMLAH			233,959,000	233,959,000

Keterangan :
null
null
null

TULUNGAGUNG, 17 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS
ALWIE, S.H.
196702281993031003

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 401382 **PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Tgl Data : 17/07/24 6:21 AM
Tanggal : 17/07/24 3:42 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14,216,566
Jumlah Barang Konsumsi		14,216,566
TOTAL		14,216,566

Keterangan :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi rusak. |
| 2. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi usang. |